

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrasjid, Chainu. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- AZ, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Nadi Offset.
- Badan Hukum Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2020. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, Cililitan : Percetakan Pohon Cahaya.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Faiz, Pan Mohamad, dkk. 2019. *Mahkota Mahkamah Konstitusi : Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta : Retika Aditama.
- _____. 2018 *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta : Konstitusi Press.
- _____. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- HS. H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. : Jakarta Prenada Media Group.
- Irwansyah dan Yunus, Ahsan. 2020. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mitra Buana Media.
- Irwansyah. 2020. *"Kajian Ilmu Hukum"* Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- MD, Moh.Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2020. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*.
- Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),
- Surbakti, Ramlan. 1982. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grafindo.
- Thaib, Dahlan. 1994. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Wijayanti , Septi Nur dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta : LabHukum Fakultas Hukum UMY.
- Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*.

Jurnal, Tesis, dan Disertasi

- Solihah, Ratnia. *Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Volume 3. No. 1 2018.
- Slallagan, Haposan. 2010. *Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*. Mimbar Hukum Volume 2. Nomor 1 Februari 2010.
- Triono. *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik ISSN 2502 – 9185. Volume 2. 2 Oktober 2017.
- Toding, Adventus. 2015. *Penyatuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*.

Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Zukifli Aspan, Menjerat Kader, *Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5 No. 1, Januari 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PPU-XVII/2019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berita Media Online

<https://rumahpemilu.org/putusan-mk-no-55-2019-pilkada-bagian-rezim-pemilu/>, Putusan MK No. 55/2019, Pilkada bagian rezim pemilu, dikases pada 19 Mei, 2023.

Antara dan Syailendra Persada.18 April 2019. *KPU: Ada 2.249 dari 810.193 TPS akan Pemungutan Suara Susulan.* Tempo (<https://nasional.tempo.co/read/1196833/kpu-ada-2-249-dari-810-193-tps-akan-pemungutan-suara-susulan/full&view=ok>)

CNN Indonesia. 20 Oktober 2020. *Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019* (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>)

Devianti Faridz, Julia Hollingsworth and Tara John. 2019. *More Than 300 Workers Dead After Indonesian Election.* CNN (<https://edition.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-deathintl/index.html>)

Indah Mutiara. *KPU Jawab Fahri Hamzah: Ada 144 Petugas KPPS Meninggal di Pileg 2014*. Detiknews. Edisi: Mei 2019. (<https://news.detik.com/berita/d-4539483/kpu-jawab-fahri-hamzah-ada-144-petugas-kpps-meninggal-di-pileg-2014>,)

Kementerian Keuangan. 26 Maret 2019. *Ini Peruntukan Anggaran Pemilu 2019*. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>)Maesaroh. 15 Maret 2013. *Anggaran Total Pemilu 2014 Rp 24,1 T*, Sindonews. (<https://nasional.sindonews.com/berita/727799/12/anggaran-total-pemilu-2014-rp241-t>)

Wijaya Kusuma. *Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair*. (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all>.)